



DOI: <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Dengan Menggunakan Aplikasi SIPD Pada Bappeda Kabupaten Mappi

Andarias Ro'son¹, Muhammad Sawir², Iqbal Miftakhul Mutjahid³

¹Universitas Terbuka, Indonesia, andariasroson22@gmail.com

²Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia, sawirmuhammad103@gmail.com

³Universitas Terbuka, Indonesia, iqbal@ecampus.ut.ac.id

Corresponding Author: andariasroson22@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to determine the evaluation of electronic-based regional development planning using the SIPD application at Bappeda Mappi Regency. The method used is a qualitative method. The results of the interview showed that the SPID application has been effective and provides convenience in analyzing data because planning requires past data. Furthermore, there are time savings, savings in paper use because data input is done online and in real time and Bappeda does not need to design a financial planning application that costs hundreds of millions. Adequacy Aspect, the SPID application has been quite satisfactory, where SPID has overcome problems related to past data and documents needed as a reference in designing electronic-based regional development planning. SPID has helped prevent data duplication, where the application will provide a notification if there is duplication in budgeting, then SPID also helps as a control tool that will inform the situation and conditions of the region as a reference in compiling regional development that is in line with the needs of the community. The aspect of equalization, the benefits of using this SPID application are very even not only for the Bappeda organization but also for other organizations such as administrators and users of regional assets. Responsiveness aspect can satisfy Bappeda's needs because it can help Bappeda in carrying out its duties, functions and positions to carry out regional development planning. Accuracy aspect, the SPID application has been valuable and useful because it can increase Bappeda's motivation in carrying out electronic-based regional development planning, but has not had a positive impact on the community, where Bappeda's planning has not met the needs and satisfaction of the community when compared to the budget prepared.*

Keyword: *SIPD Application, Development Planning Evaluation*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik dengan menggunakan aplikasi SIPD pada Bappeda Kabupaten Mappi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa aplikasi SPID telah efektif dan memberikan kemudahan dalam menganalisis data karena dalam perencanaan membutuhkan data masa lalu. Selanjutnya terdapat penghematan waktu, penghematan penggunaan kertas karena input data dilakukan secara *online* dan *real time* dan

Bappeda tidak perlu merancang aplikasi perencanaan keuangan yang menelan biaya ratusan juta. Aspek Kecukupan, aplikasi SPID telah cukup memuaskan, dimana SPID telah mengatasi masalah terkait data dan dokumen masa lalu yang dibutuhkan sebagai acuan dalam merancang perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. SPID telah membantu mencegah duplikasi data, dimana aplikasi akan memberikan notif jika terdapat duplikasi dalam penganggaran, selanjutnya SPID juga membantu sebagai alat pengendalian yang akan menginformasikan situasi dan kondisi daerah untuk sebagai acuan dalam menyusun pembangunan daerah yang searah dengan kebutuhan masyarakat. Aspek perataan, manfaat penggunaan aplikasi SPID ini sangat merata tidak hanya bagi organisasi Bappeda melainkan juga bagi organisasi lainnya seperti penatausahaan dan pengguna aset daerah. Aspek Responsifitas dapat memuaskan kebutuhan Bappeda karena dapat membantu Bappeda dalam melaksanakan tugas, fungsi dan jabatannya untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah. Aspek Ketepatan, aplikasi SPID telah bernilai dan berguna karena dapat meningkatkan motivasi Bappeda dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik, namun belum berdampak positif bagi masyarakat, dimana perencanaan Bappeda belum memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat bila dibandingkan dengan anggaran yang disiapkan.

Kata Kunci: Aplikasi SIPD, Evaluasi Perencanaan Pembangunan

PENDAHULUAN

Penggunaan aplikasi SIPD di Mappi Papua sejak tahun 2019 seharusnya mampu mengantarkan Papua sebagai daerah yang berhasil melaksanakan otonomi daerah karena dengan aplikasi SIPD, Bappeda Mappi dapat melaksanakan perencanaan pembangunan Pemda dengan anggaran yang efisien. Namun pada kenyataannya, sejak otonomi daerah berlangsung di Mappi sampai pada saat ini, Pemkab Mappi tidak mampu mengelola APBD dengan memanfaatkan aplikasi SIPD dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga mengakibatkan terjadinya pemborosan anggaran yang kemudian berdampak pada gagalnya otonomi daerah di lingkungan Pemkab Mappi.

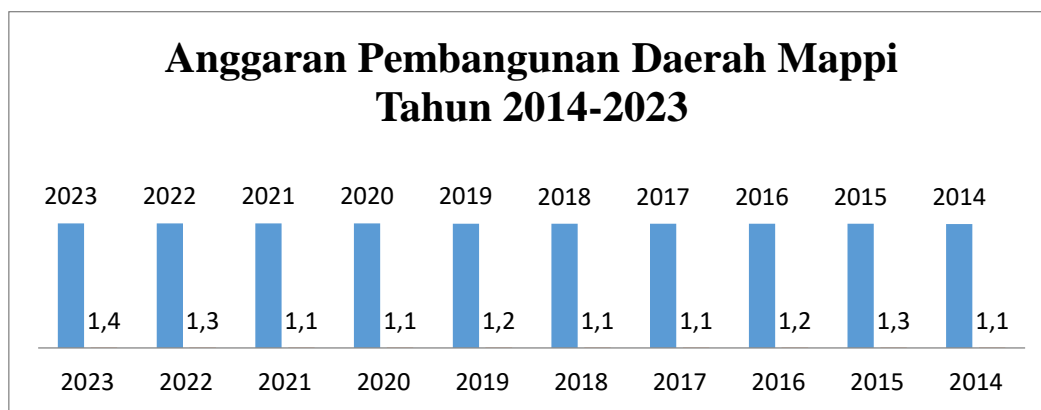
Perencanaan pembangunan daerah melalui aplikasi SIPD secara sistematis telah menghubungkan pejabat berwenang dalam membahas terkait pembangunan yang direncanakan beserta anggaran yang dibutuhkan. Pejabat berwenang antara lain stakeholder yang dapat mengakses SIPD juga turut diatur. Akun Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berperan sebagai super admin, akun admin TAPD Perencanaan (BAPPEDA) dan TAPD Keuangan (BAKUDA) yang berperan sebagai koordinator pada masing-masing proses. Akun Kepala Perangkat Daerah serta pejabat dan staf dibawahnya didaftarkan dengan menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP). Akun anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dipersiapkan untuk memfasilitasi Pokok-pokok pikiran (POKIR), serta akun auditor di Inspektorat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Proses perencanaan pembangunan daerah melalui aplikasi SIPD di Mappi dilakukan setelah adanya koordinasi antara pejabat berwenang, maka proses perencanaan dan penganggaran dilakukan secara bersama berdasar jadwal yang ditentukan oleh admin perencanaan dan admin penganggaran, dimana proses perencanaan dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang untuk menerima masukan atas rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilanjut pelaksanaan Musrenbang Rancangan Akhir RKPD secara berjenjang untuk menerima masukan atas rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan diakhiri dengan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses Perencanaan dijalankan

sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan sampai dengan selesai berdasarkan jadwal dalam sistem SIPD yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan evaluasi.

Kendati demikian apiknya sistem SIPD mengemas proses perencanaan pembangunan daerah di Mappi, namun kesepakatan dalam menganggarkan kebutuhan APBD untuk pembangunan daerah tidak se-efisien dalam menggunakan aplikasi SIPD yang tanpa boros waktu dan tenaga jaringan informasi antara pejabat berwenang dan pihak berkepentingan dapat terjadi. Seharusnya SIPD dapat mendorong efisiensi anggaran pembangunan terjadi melalui suatu proses evaluasi perencanaan pembangunan daerah karena SIPD didukung data-data perencanaan pembangunan berikut anggaran dan kinerja keberhasilannya sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah selanjutnya.

Evaluasi proses perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan aplikasi SIPD selama ini yang telah dilakukan oleh Bappeda belum menunjukkan adanya hasil perencanaan pembangunan daerah yang tepat baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam segi efisiensi anggaran pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anggaran pembangunan daerah Mappi dalam 10 tahun terakhir, anggaran pembangunan daerah yang dikeluarkan rata-rata 1,19 triliun selama sepuluh tahun terakhir. Berikut data anggaran 10 tahun terakhir anggaran pembangunan daerah Mappi, ditampilkan peneliti.



Gambar 1.1 Anggaran Pembangunan Daerah Mappi Tahun 2014-2023

Hal ini semakin diperkuat dengan rasio kemandirian daerah Mappi yang membuktikan kegagalan otonomi daerah Mappi akibat tidak efisiennya anggaran kabupaten Mappi.

Tabel 1. Rasio Kemandirian Pemda Mappi

Deskripsi	Tahun		Rasio Kemandirian		Pola Hubungan Pusat dan Daerah
	2022	2023	2022	2023	
PAD	71.357.713.015	54.365.331.861	22%	4%	Pemda tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial karena nilai rasio kemandirian < 25%.
Bantuan Pusat	327.891.033.000	1.446.900.153.047			

Sumber: data sekunder diolah peneliti, 2024

IKM dalam Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Umum Bappeda Mappi hanya mampu mencapai predikat kurang puas, ini artinya banyak Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Umum yang belum memenuhi kepuasan bagi masyarakat Mappi.

Tabel 2. IKM Bappeda Mappi

Keterangan	IKM
Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Umum	45%

Sumber: data sekunder diolah peneliti, 2024

Berdasarkan data yang disampaikan peneliti, dapat dibuktikan bahwa perencanaan pembangunan daerah kabupaten Mappi tidak efektif dalam manfaat yang dirasakan masyarakat serta tidak efisien dalam anggaran, kemudian fatalnya lagi berkontribusi positif dalam kegagalan otonomi daerah yang dijalankan. Ini artinya aplikasi SIPD tidak mampu membantu Bappeda Mappi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien hanya efisien, sangat mengecewakan.

Selanjutnya aplikasi sistem informasi SIP dalam penggunaannya karena melibatkan berbagai pihak untuk mencapai perencanaan anggaran yang notabenehnya untuk mendorong perencanaan pembangunan yang efisien maka dalam penelitian ini mengacu pada teori *New Public Management* yang dikemukakan Bovaird & Loeffler (2003) bahwa *New Public Management* merupakan, sebuah gerakan perampingan sektor publik, dan membuatnya lebih komparatif, dan mencoba untuk membuat administrasi publik, yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga ,dengan menawarkan pengukuran ekonomi, efesiensi, dan efektifitas (value for money), fleksibilitas, pilihan, dan transparansi. Implementasi konsep NPM, dapat dipandang sebagai ,suatu bentuk modernisasi ,atau reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong, demokrasi. Meutia (2017) bahwa NPM menekankan pada proses pengelolaan manajemen ketimbang perumusan kebijakan yang salah stau prinsipnya terkait devolusi manajemen kontrol sejalan dengan pengembangan mekanisme sistem pelaporan, monitoring, akuntabilitas baru, disagregasi struktur birokrasi yang besar menjadi struktur instansi yang dikuasi otonomi, secara khusus melakukan pemisahan antara fungsi-fungsi komersial dengan yang non komersial.

Teori selanjutnya diadopsi dari teori evaluasi yang dikemukakan Dunn (2000) evaluasi memiliki arti terkait, yang masing-masing mengacu pada penerapan berbagai ukuran nilai pada hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah 'evaluasi' disamakan dengan evaluasi, penilaian, dan perkiraan kata-kata yang menyatakan upaya menganalisis hasil kebijakan dalam satuan nilai. Dalam pengertian yang lebih spesifik, evaluasi berkaitan dengan menghasilkan informasi tentang nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan memiliki nilai dalam kenyataan, itu karena berkontribusi pada tujuan atau sasaran, dalam hal ini kebijakan atau program dikatakan telah mencapai tingkat kinerja yang berarti, yang berarti bahwa masalah kebijakan telah diselesaikan. diklarifikasi atau diselesaikan.

Evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan aplikasi SIPD dikabupaten Mappi sebagai suatu kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk menilai kinerja sasaran pembangunan nasional di daerah serta analisis terkait faktor keberhasilan dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga menjadi dokumen yang didapatkan dari proses pembelajaran dari aktivitas yang dialami. Ini dapat didapatkan baik dari pengalaman yang dialami sendiri ataupun dari orang lain. bagi perbaikan kebijakan pembangunan daerah pada tahap berikutnya.

Hadinya aplikasi SIPD dalam proses evaluasi perencanaan pembangunan daerah didorong oleh minimnya data dari SKPD karena lemahnya koordinasi antara Bappeda dan SKPD, minimnya SDM dan pendanaan di Bappeda untuk pengelolaan data, dan kurangnya keinginan kuat (*political will*) dari pimpinan (untuk mendorong data dan informasi) serta proses perumusan strategi, kebijakan, dan program pembangunan yang terdahulu belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data dan informasi akurat dan memadai. Seharusnya

dengan adanya aplikasi SIPD, evaluasi perencanaan pembangunan daerah di Mappi dapat searah dengan keberhasilan otonomi daerah dengan dapat dilakukannya perbandingan dari data-data hasil pembangunan dan anggaran yang telah dikeluarkan sebelumnya bukan justru malah sebaliknya dengan hasil pembangunan yang tidak *urgen* dibutuhkan masyarakat.

Sebenarnya, selama ini telah banyak penelitian yang telah mengulas terkait Evaluasi perencanaan pembangunan daerah namun dalam penelitian tersebut tidak membahas terkait penggunaan SIPD dalam proses evaluasi tersebut seperti penelitian Parinem & Karningsih (2023) Roehaenah (2019) dan Saputra (2021).

Selanjutnya penelitian terkait aplikasi SIPD di perencanaan pembangunan daerah juga pernah dilakukan namun penelitian terdahulu tersebut hanya meneliti terkait efektivitas penggunaan SIPD seperti penelitian Budi (2023) yang mengungkapkan bahwa kualitas Penerapan aplikasi (SIPD) dalam perencanaan pembangunan di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten jeneponto, sudah berjalan baik sesuai dengan dimensi teori alvaro rovha kualitas *website*. Zeber (2023) yang menemukan bahwa pemanfaatan aplikasi udajang belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya sosialisasi dan pelatihan oleh Pemerintahan pusat kepada tenaga ahli. Peran tenaga ahli yang dirasa masih kurang dalam menjalankan aplikasi SIPD. Selanjutnya Iqbal et al. (2022) yang menyarankan perlunya ada sebuah evaluasi terhadap berjalannya sebuah program merupakan salah satu cara agar kesalahan atau kekurangan aplikasi SIPPD tersebut dapat diketahui dan diperbaiki.

Langkanya penelitian terkait evaluasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik dengan menggunakan aplikasi SIPD berdampak pada rendahnya wawasan terkait evaluasi kinerja perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik dengan menggunakan aplikasi SIPD yang kemudian mendorong pentingnya penelitian ini dilakukan yang diharapkan mampu menutupi kekurangan referensi dalam *literature* administrasi publik terkait ketepatan aplikasi SIPD dalam mencapai sasaran pembangunan nasional dan daerah secara berkesinambungan baik untuk Bappeda dan masyarakat.

State of art dalam penelitian ini akan meneliti terkait ketepatan aplikasi SIPPD dalam membantu aparatur Bappeda dalam melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik yang tepat sasaran bukan hanya untuk Bappeda melainkan pula untuk masyarakat dengan menggunakan aplikasi SIPD. Berdasarkan pemaparan peneliti maka judul dalam penelitian ini “Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Dengan Menggunakan Aplikasi SIPD Pada Bappeda Kabupaten Mappi”

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pemilihan desain penelitian kualitatif didasarkan pada adanya keinginan peneliti untuk menguraikan situasi yang terjadi di objek penelitian. Nasution (2023) bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini iberangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori. Fiantika et al. (2022) bahwa penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.

Tempat pelaksanaan penelitian ini yakni pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mappi. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 2 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

Penelitian ini menurut jenis dan sumber datanya dijelaskan peneliti sebagai berikut : Data Primer adalah data yang diperoleh langsung pihak yang diperlukan datanya. (Slamet Widodo,

2023). Data sekunder Merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya. (Slamet Widodo, 2023). Sumber data primer dalam penelitian ini data wawancara. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan kinerja Bappeda Mappi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara semi terstruktur. Hikmawati (2020) bahwa wawancara dilakukan dengan adanya pertemuan antara dua orang atau lebih dan melakukan percakapan. Fahmi et al. (2022) bahwa dalam percakapan tersebut akan ditemukan informasi yang dibutuhkan peneliti. Fadjarajani (2020) bahwa jenis wawancara semi terstruktur ini lebih bebas. Budiastuti (2018) bahwa dalam *mixed-methods*, wawancara dengan semi tersruktur lebih membantu untuk memperoleh data yang dibutuhkan daripada wawancara dengan metode yang lain, hal ini disebabkan karena wawancara ini lebih bersifat pribadi sehingga informan merasa lebih nyaman.

Menurut Sugiyono (2018) bahwa terdapat tiga model interaktif dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, menggunakan alat bantu sofwere N-vivo menurut Suryani et al. (2020) bahwa menjelaskan bahwa penggunaan N-vivo untuk menganalisis data kualitatif terdiri dari, *Coding diagram*, *Coding comparison diagram*, Penyajian data (*Data Display*) dan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektifitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Dengan Menggunakan Aplikasi SIPD Pada Bappeda Kabupaten Mappi?

Evaluasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik dengan menggunakan aplikasi SIPD pada Bapeda berjalan efektif, hal ini disebabkan karena kemudahan dalam proses melakukan perencanaan pembangunan daerah, mudah melakukan analisis data dan aplikasi SPID juga dapat menghemat waktu. Berikut kutipan wawancaranya peneliti dengan narasumber.

Adm (wawancara 3 Mei 2024) mengemukakan bahwa *“sejauh ini kinerja perencanaan pembangunan daerah telah efektif dengan menggunakan aplikasi SPID. Efektif artinya pembangunan yang dilaksanakan sejalan dengan perencanaan pembangunan. Kemudahan evaluasi dilakukan evaluasi kinerja dengan menggunakan aplikasi SPID karena aplikasi tersebut memuat data-data masa lalu terkait perencanaan dan anggaran pembangunan yang akurat sehingga dapat dengan mudah disinkronkan dengan kebutuhan analisis untuk menilai pembangunan yang dijalankan serta anggarannya”*

Demikian halnya narasumber berbeda mengemukakan bahwa aplikasi tersebut sangat efektif karena terutama dalam menganalisis data. Idrs menyatakan bahwa *“perencanaan pembangunan setelah menggunakan aplikasi SPID sangat efektif. Hal ini disebabkan karena dengan adanya aplikasi SPID, Bappeda dapat dengan mudah melakukan analisis berdasar data masa lalu perencanaan pembangunan dan anggaran yang tersimpan dalam aplikasi SPID. dibandingkan dengan data pembangunan dan anggarannya Aplikasi SPID mempermudah proses evaluasi kinerja”*

Narasumber berbeda juga mengemukakan aplikasi SPID telah membantu proses perencanaan pembangunan daerah karena menghemat waktu proses perencanaan pembangunan daerah Mappi. Hud (wawancara 5 Mei 2024) *membeberkan bahwa sejauh ini untuk proses evaluasi sangat efektif karena aplikasi SPID dapat menghemat waktu dalam perencanaan pembangunan daerah beserta rancangan anggarannya.*

Keterangan senada juga dikemukakan narasumber berbeda, berikut kutipan wawancanya. Slh (wawancara 5 Mei 2024) *menyatakan bahwa proses evaluasi kinerja dengan SPID dapat menghemat waktu, dimana berdasar jadwal yang ditentukan oleh admin kita dengan pemangku kepentingan lainnya dapat berkumpul untuk membahas persoalan perencanaan tersebut tanpa harus membuang waktu menghubungi rekan yang satu dengan yang lainnya.*

Perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik dengan menggunakan aplikasi SIPD pada Bappeda berjalan dengan efisien karena adanya penghematan penggunaan kertas dan alat tulis, menghemat biaya APBD dalam perancangan untuk membangun sistem aplikasi, penghematan biaya perjalanan dan penggunaan internet serta kebutuhan jumlah pegawai. Berikut kutipan wawancaranya.

Irh (wawancara 3 Mei 2024) menyampaikan bahwa dari “*segi efisien, sangat efisien karena ini dilakukan secara online dan realtime. Data dapat diinput tanpa adanya kertas, pena, dll. Hal inilah yang menunjukkan penggunaan SPID mencapai efisiensi terutama dalam penghematan biaya operasional seperti kertas dan alat tulis*”.

Pendapat senada dikemukakan narasumber berbeda, berikut kutipan wawancaranya. Imil (wawancara 5 Mei 2024) mengatakan bahwa “*penggunaan aplikasi SPID dapat mengefisiensi biaya operasional dalam penggunaan kertas dan alat tulis. Dalam hal ini data perencanaan dan anggaran untuk kebutuhan pembangunan daerah di input melalui sistem*”.

Narasumber yang berbeda memaparkan keterangan yang sama pada peneliti, berikut kutipan wawancaranya. Ikh (wawancara 9 Mei 2024) mengatakan bahwa “*hadirnya aplikasi SPID dapat menghemat biaya APBD yang dianggarkan untuk membangun sistem aplikasi perencanaan dan keuangan. Karena itu, dengan penggunaan SIPD, akan membuat penghematan yang bisa dilakukan*”.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh narasumber yang berbeda, berikut kutipan wawancaranya. Yqb (wawancara 7 Mei 2024) juga menerangkan bahwa “*membangun sistem aplikasi perencanaan dan keuangan membutuhkan biaya yang cukup tinggi karena itu dengan hadirnya SPID daerah dapat mengatasi biaya ratusan juta untuk membangun sistem aplikasi perencanaan keuangan*”

Keterangan yang sama dilontarkan narasumber berbeda berikut kutipan wawancaranya. Adm (wawancara 9 Mei 2024) juga turut menyampaikan bahwa manfaat lain dalam penggunaan SIPD adalah penghematan lain bisa dari biaya perjalanan dan penggunaan internet untuk setiap pertemuan atau pengurusan perencanaan pembangunan daerah dan anggarannya.

Narasumber yang berbeda memaparkan keterangan yang sama pada peneliti, berikut kutipan wawancaranya. Idr mengemukakan bahwa *Penghematan juga dapat dirasakan dalam hal kebutuhan jumlah pegawai. Dengan penggunaan SIPD, jumlah pegawai yang dibutuhkan bisa jauh lebih sedikit dibanding pengerjaan secara manual*.

Dengan demikian penggunaan aplikasi SPID dapat memudahkan dalam melakukan proses perencanaan pembangunan daerah. Aplikasi SPID juga memberikan kemudahan dalam menganalisis data karena dalam perencanaan membutuhkan data masa lalu. Selanjutnya terdapat penghematan waktu dalam proses perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan aplikasi SPID.

Penggunaan aplikasi SPID telah mendorong terjadinya efisiensi anggaran dimana terdapat penghematan penggunaan kertas karena input data dilakukan secara *online* dan *real time*. Sementara itu penghematan lainnya yakni Bappeda tidak perlu merancang aplikasi perencanaan keuangan yang menelan biaya ratusan juta. Penghematan biaya perjalanan dinas untuk membahas perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik dengan menggunakan aplikasi SPID serta penghematan penggunaan internet yang disebabkan karena dilakukan di kantor menggunakan WIFI serta kebutuhan jumlah pegawai karena tidak perlu banyak pegawai dalam satu aplikasi semua fungsi saling berintergrasi berikut data-data yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan daerah.

2. Kecukupan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Dengan Menggunakan Aplikasi SIPD Pada Bappeda Kabupaten Mappi

SPID telah mengatasi masalah yang dihadapi oleh Bappeda dalam memperoleh data yang diperlukan dan berbagai dokumen. SPID juga dapat menyempurkan proses penyusunan anggaran dan SPID juga dapat sebagai fungsi pengendalian di Bappeda Mappi, berikut kutipan wawancaranya.

Yqb (wawancara 28 Mei 2024) menyampaikan bahwa *“SPID mengatasi kesulitan dalam proses penyusunan data perencanaan yang menggunakan excel atau Microsoft acces yang datanya di input secara manual sehingga datanya tidak terpantau secara langsung.*

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh narasumber yang berbeda, berikut kutipan wawancaranya. Ysf (wawancara 30 Mei 2024) *juga memaparkan bahwa “SPID dapat menyempurkan proses penyusunan anggaran seperti mengatasi kasus duplikasi anggaran yang direncanakan dalam proses penyusunan APBD selain itu SIPD juga menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan tahunan”*

Narasumber yang berbeda memaparkan keterangan yang sama pada peneliti, berikut kutipan wawancaranya. Syb (wawancara 1 Juni 2024) menegaskan bahwa *“SIPD juga sebagai alat untuk pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam rangka menjamin pencapaian target sasaran dan program. adapun tugas Bappeda yaitu mendorong ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan dapat pertanggungjawabkan untuk perencanaan dan koordinasi pengumpulan dan pemanfaatan data untuk perencanaan.”*

Dengan demikian, hasil yang diinginkan dari penggunaan aplikasi SPID telah cukup memuaskan, dimana SPID telah mengatasi masalah terkait data dan dokumen masa lalu yang dibutuhkan sebagai acuan dalam merancang perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. SPID telah membantu mencegah duplikasi data, dimana aplikasi akan memberikan notifikasi jika terdapat duplikasi dalam penganggaran, selanjutnya SPID juga membantu sebagai alat pengendalian yang akan menginformasikan situasi dan kondisi daerah untuk sebagai acuan dalam menyusun pembangunan daerah yang searah dengan kebutuhan masyarakat.

3. Perataan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Dengan Menggunakan Aplikasi SIPD Pada Bappeda Kabupaten Mappi

Biaya manfaat juga dirasakan juga oleh organisasi berbeda selain Bappeda yang memiliki keterkaitan sistem kerja yakni organisasi penatausahaan aset dan pengguna aset daerah Manfaat juga dalam anggaran kertas jika menggunakan SIPD. Sementara itu aplikasi SPID ini disediakan kementerian dalam negeri yang penggunaannya dapat dilakukan dalam jangka waktu lama.

Ayb (wawancara 2 Juni 2024) mengatakan bahwa *“biaya yang dikeluarkan untuk membuat aplikasi SIPD ditanggung pusat namun biaya itu hanya satu kali saat proses pembuatan SPID namun manfaat yang diberikan sangat banyak dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan anggarannya”*.

Narasumber yang berbeda memaparkan keterangan yang sama pada peneliti, berikut kutipan wawancaranya. Syb (wawancara 3 Juni 2024) mengatakan bahwa *“dengan aplikasi SPID manfaat ini merata juga ke seluruh organisasi yang berkaitan dengan Bappeda seperti penatausahaan aset daerah dan pengguna aset daerah di Indonesia, apabila dikalikan empat modul atau empat aplikasi seperti untuk perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga akuntansi dan pelaporan, maka penghematan di seluruh organisasi Pemda bisa mencapai Rp 6,8 triliun sementara biaya pembuatan SPID oleh kementerian dalam negeri tidak menyentuh angka 6,8 triliun”*.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh narasumber yang berbeda, berikut kutipan wawancaranya. Yqb (wawancara 5 Juni 2024) menyampaikan bahwa *manfaat dalam penghematan anggaran kertas jika menggunakan SIPD, anggaran kertas 0 kertas per tahun, sedangkan dulu membutuhkan 279.000 rim kertas per tahun untuk proses perencanaan saja,*

belum proses yang lain, sedangkan biaya pembuatan SPID hanya dikeluarkan 1 kali dan bersifat jangka panjang.

Dengan demikian, manfaat penggunaan aplikasi SPID ini sangat merata tidak hanya bagi organisasi Bappeda melainkan juga bagi organisasi lainnya seperti penatausahaan dan pengguna aset daerah, manfaat penghematan ini mencapai 6,8 triliun sementara biaya pembuatan SPID oleh kementerian dalam negeri tidak menyentuh angka 6,8 triliun.

Manfaat juga dalam penggunaan kertas, anggaran kertas menjadi 0 pertahun, bila dibandingkan dulu anggaran kerja untuk organisasi Bappeda saja melibatkan penggunaan 29.000 rim kertas per tahun untuk proses perencanaan saja, belum proses yang lainnya seperti laporan, dll.

4. Responsifitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Dengan Menggunakan Aplikasi SIPD Pada Bappeda Kabupaten Mappi

Bappeda Mappi merasakan kepuasan dalam menggunakan aplikasi tersebut, berikut kutipan wawancaranya. Adm (wawancara 9 Juni 2024) *menyampaikan bahwa “hasil kebijakan ini sangat memuaskan kebutuhan dari Bappeda Litbang karena Bappeda Litbang sangat membutuhkan suatu aplikasi yang dapat membantu dalam proses pengumpulan dokumen-dokumen penting sebagai dasar membuat perencanaan.*

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh narasumber yang berbeda, berikut kutipan wawancaranya. Imil (wawancara 10 Juni 2024) mengatakan bahwa *“kebijakan penggunaan SPID sangat menguntungkan Bappeda dan organisasi terkait lainnya di lingkungan pemerintah daerah karena dapat menjawab masalah dokumen-dokumen penunjang yang terkadang sulit dicari untuk acuan dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah”.*

Narasumber yang berbeda memaparkan keterangan yang sama pada peneliti, berikut kutipan wawancaranya. Yqb (wawancara 11 Juni 2024) menyampaikan bahwa *“Hasil kebijakan adanya SPID sangat memuaskan karena SPID dapat menghemat anggaran daerah yang terkadang tidak mencukupi untuk urusan dokumen-dokumen berharga seperti saat membangun suatu sistem informasi untuk perencanaan pembangunan mandiri”.*

Dengan demikian, aplikasi SPID dapat memuaskan kebutuhan Bappeda karena dapat membantu Bappeda dalam melaksanakan tugas, fungsi dan jabatannya untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah.

5. Ketepatan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Dengan Menggunakan Aplikasi SIPD Pada Bappeda Kabupaten Mappi

Ketepatan terkait hasil dan tujuan penggunaan aplikasi SPID tidak tercapai, pada Bappeda tujuan perencanaan pembangunan daerah dapat selesai sesuai tepat waktu, namun dampak bagi masyarakat program ini belum mencapai sarannya, berikut kutipan wawancaranya. Ysf (wawancara 13 Juni 2024) memaparkan bahwa *“hasil tujuan yang diinginkan dari aplikasi SPID ini sangat bernilai bagi kita dan mampu meningkatkan motivasi kerja untuk melaksanakan perencanaan pembangunan dan anggaran daerah”.*

Narasumber berbeda juga mengemukakan aplikasi SPID telah membantu proses perencanaan pembangunan daerah karena menghemat waktu proses perencanaan pembangunan daerah Mappi. Syb (wawancara 15 Juni 2024) juga mengatakan bahwa *“selama ini implementasi SPID telah berdampak positif bagi kemudahan proses kerja kami. Namun, pada masyarakat luas dampak ini belum terasa karena keterbatasan kami dalam menganalisis anggaran data masa lalu sebagai dasar acuan dalam perencanaan pembangunan yang terjadi saat ini”.*

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh narasumber yang berbeda, berikut kutipan wawancaranya. Ayb (wawancara 17 Juni 2024) mengemukakan bahwa *“dampak positif hanya pada organisasi pemerintahan yang lebih mudah dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah dan anggarannya. Untuk dampak yang lebih luas saat ini maksudnya*

pada masyarakat Mappi belum berdampak sama sekali hal dimana aplikasi SPID sementara hanya mampu menjawab masalah dalam Bappeda terkait perencanaan pembangunan daerah namun belum menjawab terkait masalah kebutuhan masyarakat. Hal inilah mengakibatkan banyak pembangunan daerah yang mengalami kegagalan.

Keterangan yang sama dilontarkan narasumber berbeda berikut kutipan wawancaranya. Adm (wawancara 19 Juni 2024) menyampaikan bahwa “*dampak positif yang ada pada organisasi memang sangat signifikan namun aplikasi tersebut jika membantu melayani kebutuhan pembangunan searah dengan keinginan masyarakat atau kebutuhan masyarakat untuk saat ini belum memadai. Analisis kebutuhan masyarakat dalam sektor pembangunan itu membutuhkan seseorang yang kompeten dalam melakukan analisa dan itu membutuhkan kapabilitas dari aparatur secara khusus namun saat ini kapabilitas tersebut masih minim. Jadi dari segi ketepatan, aplikasi ini hanya tepat untuk memudahkan urusan pekerjaan Bappeda sementara itu belum tepat untuk membaca kondisi dan situasi.*

Dengan demikian, aplikasi SPID telah bernilai dan berguna karena dapat meningkatkan motivasi Bappeda dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik, namun belum berdampak positif bagi masyarakat, dimana perencanaan Bappeda belum memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat bila dibandingkan dengan anggaran yang disiapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini, disajikan sebagai berikut :

- 1) Efektifitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Dengan Menggunakan Aplikasi SIPD Pada Bappeda Kabupaten Mappi. Aplikasi SPID dapat memudahkan dalam melakukan proses perencanaan pembangunan daerah. Aplikasi SPID juga memberikan kemudahan dalam menganalisis data karena dalam perencanaan membutuhkan data masa lalu. Selanjutnya terdapat penghematan waktu dalam proses perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan aplikasi SPID. Penggunaan aplikasi SPID telah mendorong terjadinya efisiensi anggaran dimana terdapat penghematan penggunaan kertas karena input data dilakukan secara online dan real time. Sementara itu penghematan lainnya yakni Bappeda tidak perlu merancang aplikasi perencanaan keuangan yang menelan biaya ratusan juta. Penghematan biaya perjalanan dinas untuk membahas perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik dengan menggunakan aplikasi SPID serta penghematan penggunaan internet yang disebabkan karena dilakukan di kantor menggunakan WIFI serta kebutuhan jumlah pegawai karena tidak perlu banyak pegawai dalam satu aplikasi semua fungsi saling berintergrasi berikut data-data yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Kecukupan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Dengan Menggunakan Aplikasi SIPD Pada Bappeda Kabupaten Mappi. Aplikasi SPID telah cukup memuaskan, dimana SPID telah mengatasi masalah terkait data dan dokumen masa lalu yang dibutuhkan sebagai acuan dalam merancang perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. SPID telah membantu mencegah duplikasi data, dimana aplikasi akan memberikan notif jika terdapat duplikasi dalam penganggaran, selanjutnya SPID juga membantu sebagai alat pengendalian yang akan menginformasikan situasi dan kondisi daerah untuk sebagai acuan dalam menyusun pembangunan daerah yang searah dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Perataan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Dengan Menggunakan Aplikasi SIPD Pada Bappeda Kabupaten Mappi. Manfaat penggunaan aplikasi SPID ini sangat merata tidak hanya bagi organisasi Bappeda melainkan juga bagi organisasi lainnya seperti penatausahaan dan pengguna aset daerah, manfaat penghematan ini mencapai 6,8 triliun sementara biaya pembuatan SPID oleh kementerian dalam negeri tidak menyentuh angka 6,8 triliun. Manfaat juga dalam anggaran kertas, anggaran kertas menjadi 0 pertahun, bila dibandingkan dulu anggaran kerja untuk organisasi Bappeda saja melibatkan penggunaan

29.000 rim kertas per tahun untuk proses perencanaan saja, belum proses yang lainnya seperti laporan, dll.

4) Responsifitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Dengan Menggunakan Aplikasi SIPD Pada Bappeda Kabupaten Mappi. Aplikasi SPID dapat memuaskan kebutuhan Bappeda karena dapat membantu Bappeda dalam melaksanakan tugas, fungsi dan jabatannya untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah.

5) Ketepatan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Dengan Menggunakan Aplikasi SIPD Pada Bappeda Kabupaten Mappi. Aplikasi SPID telah bernilai dan berguna karena dapat meningkatkan motivasi Bappeda dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik, namun belum berdampak positif bagi masyarakat, dimana perencanaan Bappeda belum memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat bila dibandingkan dengan anggaran yang disiapkan.

REFERENSI

- Bovaird, Tony, and Elke Loeffler. *Public Management and Governance*. Routledge, 2003.
- Budi, Muh.Eko Setia. "EVALUASI PENERAPAN KUALITAS APLIKASI SIPD DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO," 2023. <http://eprints.ipdn.ac.id/15121/>.
- Budiastuti, Dyah. *VALIDITAS DAN RELIABILITAS PENELITIAN Dengan Analisis Dengan NVIVO, SPSS Dan AMOS*. Penerbit Mitra Wacana Media, 2018.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Gadjah Mada Press, 2000.
- Fadjarajani, Siti. *Metodologi Penelitian, Pendekatan Multidisipliner*. Ideas Publishing, 2020.
- Fahmi, Jasmansyah, Yusawinur Barella, Eka Fajar Rahmani, Utami Ratna Swari, Ainu Zumrudiana, Yani Sri Mulyani, Balqis Husain, and Beny Hamdani. *Metode Penelitian Pendidikan*. Zahir Publishing, 2022.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, et al. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Iqbal, Mahathir Muhammad, Sri Handayani, and Dewi Istanti Safitr. "Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah." *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik* 3, no. 2 (2022): 173–185. <https://doi.org/10.33474/jisop.v3i2.11192>.
- Meutia, Intan Fitri. *REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK*. AURA, 2017.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative, 2023.
- Parinem, and Karningsih. "Analisis Perencanaan Dan Evaluasi Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah." *Jurnal Media Administrasi* 6, no. 2 (2023): 115–119. <https://doi.org/10.56444/jma.v6i2.491>.
- Roehaenah. "EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU." *Jurnal Ilmu Administrasi REFORMASI* 4, no. 1 (2019): 39–50. <https://doi.org/10.33603/.v4i1.2649>.
- Saputra, Gede Teguh Dedy. "ANALISIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus: Evaluasi Perencanaan Penganggaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Sesuai Target Dalam RKPD Dan Renja Tahun 2021)." *Jurnal Widya Publika* 11, no. 1 (2021): 59–70. <https://doi.org/10.47329/widyapublika.v11i1.1026>.
- Sugiyono. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R & D*. Bandung: Alfabeta, CV, 2018.
- Suryani, Endah Tri Priyatni, Ani Wilujeng, Rifka Fachrunnisa Zakaria, Achmad Supriyanto, and Imbalan. *Pemanfaatan NVivo Dalam Penelitian Kualitatif NVivo Untuk Kajian Pustaka, Analisis Data, Dan Triangulas*. LP2M UM, 2020.

Zeber, Alif Dzaki Kholillah. “EVALUASI PEMANFAATAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAAN PEMBANGUNAN DI KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI,” 2023.